

# Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017

RANGGA KUSUMO\*

DPR RI

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270

Indonesia

HURRIYAH\*\*

Pusat Kajian Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, 16424

Indonesia

Email: kusumorangga@gmail.com

## ABSTRAK

Populisme bukanlah fenomena baru di Indonesia. Gerakan perlawanan populisme dalam sejarah Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, sejak masa Orde Lama hingga pasca-Orde Baru. Pada masa Orde Lama, muncul gagasan Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme) yang digagas oleh Soekarno sebagai upaya melawan kolonialisme. Di akhir masa Orde Baru, muncul gerakan perlawanan mahasiswa yang menentang kekuasaan rezim otoritarianisme, dan bahkan berhasil menjatuhkan pemerintahan Soeharto. Pasca-Orde Baru, populisme hadir dalam bentuk munculnya figur-figur yang dianggap populis dan juga kebijakan-kebijakan populernya. Pada tahun 2016-2017, fenomena yang terkait dengan populisme juga terjadi, namun kali ini dalam bentuk aksi massa yang terkait isu keagamaan, yaitu Aksi Bela Islam (ABI) yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Rangkaian Aksi Bela Islam ini melibatkan banyak elemen untuk menuntut keadilan hukum bagi Ahok yang dinilai telah menistakan Alquran. Beberapa argumen menjelaskan bahwa fenomena Aksi Bela Islam merupakan kompetisi antarelite oligarki, atau bagian dari Islamisasi yang lebih luas, seperti mengubah konstitusi menjadi hukum Islam atau sekadar bagian dari upaya merusak proses kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mengacu pada argumentasi Veda Hadiz terkait populisme Islam, Aksi Bela Islam yang menggunakan simbol Islam sebagai pemersatu dan landasan mobilisasi diyakini akan mengarah kepada terbentuknya populisme Islam di Indonesia. Namun, studi ini menunjukkan bahwa walaupun Aksi Bela Islam memperlihatkan adanya unsur-unsur populisme Islam, seperti aliansi multikelas dan narasi satu *ummah*, namun gerakan Aksi Bela Islam ini lebih merupakan populisme Islam semu (*pseudo Islamic populism*), daripada populisme Islam baru yang diargumentasikan oleh Hadiz. Studi ini menemukan bahwa hanya sebagian saja unsur yang dipenuhi. Aliansi dari mereka yang terhimpun tidak bertahan lama, serta pemaknaan terhadap *ummah* beragam di antara peserta Aksi Bela Islam sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan tertentu dalam membangun konsep populisme Islam telah membuat konsep tersebut kurang mampu menangkap fenomena populisme di dalam konteks masyarakat Muslim.

Kata kunci: populisme Islam, aliansi multikelas, pembela Islam

---

\* Penulis adalah Staf Ahli di DPR RI.

\*\* Penulis adalah Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI.

**ABSTRACT**

Populism is not a new phenomenon in Indonesia. The history of populism and populist movements has long been existed in Indonesian history. During the Old Order era, populism has appeared in the notion of Nasakom (a combination of nationalism, religion and communism) which advocated by Soekarno, as a form of populist idea to challenge colonization. At the end of the New Order era, student movements emerged as the resistance movement against the authoritarian regime, which successfully toppled down Soeharto's administration. In the post-Soeharto era, populism appeared in the form of populist figures and their populist policies. In 2016-2017, populism has taken a new form of Islamic populism, with the emergence a series of so-called *Aksi Bela Islam* (the Action to Defend Islam), driven by the National Movement of Guards Fatwa Council of UIama Indonesia (GNPF-MUI). Supported by various elements of Islamist groups, the series of *Aksi Bela Islam* demanded legal justice for perceived blasphemous speech against Qur'an by Jakarta's governor, Basuki Tjahaja "Ahok" Purnama. Previous studies argue that the phenomenon of *Aksi Bela Islam* is a competition between the oligarchic elite, or a wider effort of Islamization such as changing the constitution into Islamic law, or merely an effort to undermine the 2017 Jakarta's election. Following Hadiz's argument on the new Islamic populism, the use of Islam as a unifier and the basis for mobilization in the *Aksi Bela Islam* series will lead to the emergence of a new Islamic populism in Indonesia. However, this study shows that although there are elements of Islamic populism presented in *Aksi Bela Islam*, such as multi-class alliances and the narration of *ummah*, this study argues that *Aksi Bela Islam* was more of a pseudo-Islamic populism and not necessarily presented a new Islamic populism. This study found that there were only a few elements of new Islamic populism existed in *Aksi Bela Islam*. Yet, these elements are also limited: not only the cohesiveness of the cross-class alliance within the *ummah* in *Aksi Bela Islam* is only temporary, the meaning of the *ummah* is also varied and diverge among participants of *Aksi Bela Islam*. The study suggests that the use of a particular approach in developing the concept of Islamic populism has made the concept less able to capture the phenomenon of populism in the context of Muslim societies.

Keywords: islamic populism, multi-class alliances, Islamic Defender

DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172>

**PENDAHULUAN**

Studi mengenai populisme sudah cukup lama berkembang utamanya menyoar kawasan Amerika Latin dan belakangan Amerika Utara dan Eropa dan telah menjadi studi global. Namun demikian, studi mengenai populisme sendiri masih dirasakan kurang melihat kawasan Asia Pasifik walaupun telah ada beberapa kasus yang bisa menjadi perbandingan analisis (Moffit 2014). Beberapa ilmuwan melihat kemunculan populisme di beberapa negara Asia, seperti Thailand pada masa Thaksin (McCargo 2001; Phongpaichit & Baker 2008), Filipina pada masa Estrada (Hedman 2001), dan Korea Selatan pada masa Roh Moo-

-Hyun hingga sosok Paul Hanson di Australia (Moffit 2014). Karena itu, studi-studi mengenai negara-negara Asia yang terkait dengan aspek populisme menjadi salah satu kajian yang mulai menanjak belakangan ini untuk mengisi kekosongan tersebut.

Mengikuti tren tersebut, studi-studi mengenai populisme juga mulai menjamah Indonesia (i.e. Hadiz & Robison 2017; Hadiz 2014; Mietzner 2014; Pratikno & Lay 2013; Okamoto 2009; Hamid 2014). Kecenderungan ini bukanlah hal yang mengejutkan mengingat dalam sejarah Indonesia, populisme telah muncul dalam berbagai bentuk, bahkan sudah ada sebelum era reformasi. Pada era Soekarno misalnya, muncul aliansi perlawanan yang digagasnya untuk melawan kolonialisme yang dikenal dengan semboyan Nasionalisme, Agama, Komunisme (Nasakom). Selain itu, Hadiz (2016) juga menyebutkan munculnya gejala populisme Islam lama (*old Islamic populism*), yang muncul sebagai warisan dari kebangkitan Pan-Islamisme yang muncul pada awal abad ke-20. Pada masa akhir Orde Baru, populisme dalam bentuk gerakan mahasiswa muncul untuk menurunkan kekuasaan rezim Soeharto yang dianggap korup dan tidak demokratis. Setelahnya, pada masa reformasi, beberapa analisis menunjukkan adanya bentuk-bentuk populisme yang terjadi di Indonesia yang disematkan ke beberapa presiden dari Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo (sebagai gubernur). Megawati dipersepsikan sebagai perwakilan 'orang kecil' (Ziv 2001); Susilo Bambang Yudhoyono dinilai populis karena program pemberian bantuan tunai kepada rakyat miskin (Mietzner 2009); sementara Joko Widodo dianggap populis karena mewakili keinginan orang banyak (Hamid 2014). Tidak hanya itu, kemunculan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan membawa partai yang baru dibentuknya, Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), menjadi partai oposisi terkuat juga dianggap mewakili fenomena populisme tersebut (Aspinall 2015).

Namun belakangan, perhatian para sarjana mulai beralih ke populisme di kalangan Muslim di Indonesia dan menganggap bahwa identitas agama (dalam hal ini Islam) telah menjadi sumber baru untuk mobilisasi politik. Kemenangan Anies Baswedan dalam pemilihan

gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang menjadi salah satu kasus yang mewakilinya dan menjadi bagian dari populisme dalam bentuk mobilisasi politik kelompok sayap kanan Muslim (Setijadi 2017). Penerapan analisis populisme terhadap fenomena yang terjadi di Asia, dan juga Indonesia, mendapat kritik yang tajam dari beberapa ilmuwan. Salah satu di antaranya adalah seorang Indonesianis senior dari Jepang, Takashi Siraishi, dalam ceramahnya di seminar nasional di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2017 yang beranggapan bahwa analisis dengan menggunakan populisme tidak akan mampu menangkap dan menjelaskan fenomena di Indonesia dengan baik. Kritik ini tidak terlepas dari pengertian konsep populisme sendiri yang tidak tunggal. Beberapa literatur yang merujuk kepada populisme di Asia menunjukkan bahwa kebijakan yang populer di mata publik dari pemimpin sebuah negara ataupun pernyataan dan sikap yang serupa dapat dikategorikan sebagai bagian dari populisme. Sementara, konsep populisme sendiri tidak serta-merta diartikan secara sederhana, seperti pengertian yang dibangun dari Eropa dan Amerika Utara misalnya. Cas Mudde (2007) misalnya menyebutkan paling tidak populisme mengandung unsur anti-kemapanan, anti-otoriterisme dan kembali ke nilai dasar. Karena itu, kritik Siraishi menjadi beralasan karena sikap anti-kemapanan sering kali kurang tercermin dari beberapa kasus di Asia, atau paling tidak berbeda dalam bentuknya.

Tulisan ini mencoba untuk melihat fenomena terbaru dalam politik Indonesia yang terkait dengan mobilisasi dengan menggunakan identitas Islam yang sering dikaitkan dengan populisme. Salah satu yang menjadi salah satu contoh dari mobilisasi tersebut adalah aksi-aksi berkumpulnya umat Islam di Monumen Nasional (Monas) yang intensif dilakukan terutama menjelang pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 untuk menyikapi pernyataan gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dianggap menghina ayat Alquran. Belakangan, kesuksesan mereka dalam memobilisasi dan kemudian sedikit banyak memengaruhi hasil pemilihan gubernur tersebut diulangi dengan melakukan aksi reuni di tempat yang sama pada tanggal 2 Desember 2018. Melihat masih banyaknya umat Islam yang menghadiri Monas

menandakan bahwa sentimen keagamaan masih menjadi bagian dari politik di Indonesia yang kali ini disinyalir hendak diarahkan untuk memengaruhi pemilihan presiden tahun 2019. Namun, berbeda dengan argumen lainnya, tulisan ini mencoba untuk melihatnya secara langsung dengan pengertian populisme, seperti dikembangkan di Eropa dan Amerika Utara dan membandingkannya dengan pengertian dari populisme Islam yang diajukan oleh Vedi Hadiz. Tentunya pendekatan semacam ini memiliki resiko tertentu mengingat perbedaan kawasan memunculkan perbedaan karakter masyarakatnya. Namun, paling tidak upaya ini dapat menawarkan perbandingan secara langsung dari kasus-kasus yang berbeda dengan kerangka analisis yang sama.

Pada tahun 2016-2017, terjadi aksi massa yang disebut Aksi Bela Islam (ABI) yang dipelopori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). Aksi Bela Islam (ABI) ini merupakan peristiwa ketika umat Islam berkumpul di ibukota Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk aksi demonstrasi. Dalam Aksi Bela Islam tersebut disampaikan tuntutan agar negara segera mengadili Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas dugaan kasus penodaan agama yang menjeratnya saat berpidato di Kepulauan Seribu, Jakarta. Terdapat beragam versi terkait jumlah pasti massa dalam Aksi Bela Islam, namun ada salah satu sumber yang menjelaskan bahwa GNPF-MUI telah berhasil menghimpun sekitar 3,2 juta massa aksi yang hadir di depan Istana Negara pada tanggal 4 November 2016 (detik.com, 5 Desember 2016).<sup>1</sup>

Telah ada beberapa literatur yang membahas mengenai Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI dari berbagai perspektif. Terdapat tulisan yang menganalisis bahwa mobilisasi massa dalam Aksi Bela Islam telah memunculkan sentimen anti-Ahok, baik berdasarkan kelas maupun identitas, dinilai tidak terjadi tanpa adanya kompetisi antarelite oligarki (Hadiz 2017). Selanjutnya, ada perspektif yang memandang bahwa Aksi Bela Islam lebih dalam dari hanya sekadar bagian dari ekspresi politik

---

<sup>1</sup> Terdapat beberapa versi terkait jumlah massa aksi yang hadir dalam Aksi Bela Islam 411 dari berbagai media online. Penulis tidak menanyakan dan memang tidak ada dokumen resmi tertulis dari GNPF-MUI tentang berapa jumlah massa aksi. Hanya perkiraan jutaan orang saja keterangan yang didapatkan.

di negara demokrasi, melainkan juga sebagai upaya Islamisasi yang lebih luas, seperti mengubah konstitusi menjadi hukum Islam, mengusulkan pelarangan pemimpin nonmuslim di negara mayoritas Muslim, melaksanakan ketentuan syariah yang lebih luas dan mengusulkan kandidat politik dari umat Islam (Fealy 2016). Terakhir pandangan bahwa Aksi Bela Islam yang dipelopori oleh kelompok Islam garis keras Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa kelompok garis keras Islam lainnya telah memunculkan seruan sektarian/kebencian terhadap ras tertentu yang dinilai dapat merusak proses kampanye dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017 (Wilson 2016). Thomas Power, seorang peneliti dari Australian National University memberikan kritik terhadap pernyataan Vedi R. Hadiz tentang peran elite oligarki dalam memobilisasi massa dalam Aksi Bela Islam yang dinilai perlu diteliti lebih mendalam. Menurut Power (2018) terdapat juga peserta yang inisiatif mengikuti aksi atas keinginan sendiri karena sadar Ahok memang telah menista agama.

Mengikuti kritik terhadap konsep populisme Islam tersebut, tulisan ini mencoba untuk melihat ABI sebagai salah satu contoh dari fenomena yang memiliki beberapa karakter populisme. Dengan menelusuri motif penyelenggaraan serta kehadiran peserta ABI, tulisan ini membandingkan aksi tersebut menurut konsepsi populisme yang dibangun berdasarkan di Eropa dan Amerika Utara dengan populisme Islam yang dibangun berdasarkan masyarakat Muslim. Studi ini menemukan bahwa konsep populisme Islam memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena populisme dalam masyarakat Muslim secara lebih luas. Salah satu alasannya adalah penerapan pendekatan tertentu yang membatasi kemampuannya menjelaskan fenomena-fenomena lainnya yang lebih luas.

## TINJAUAN TEORITIS

Seperti telah disebutkan sebelumnya, populisme tidak memiliki makna yang tunggal. Walaupun pada umumnya, konsep ini disematkan pada penggunaan isu-isu yang populer di mata masyarakat. Lebih khusus lagi, kelompok masyarakat yang dimaksud di dalamnya adalah mereka

yang terpinggirkan. Tidak heran jika konsep ini dipahami sebagai sebuah fenomena sosial dan politik yang muncul dari kalangan orang biasa (*common people*), biasanya mereka yang tidak berpendidikan tinggi, melawan kesenjangan ekonomi, ancaman budaya dari mereka yang memiliki nilai berbeda di dalam negeri dan dari luar negeri, kemapanan elite yang berkuasa (*establishment elites*), dan pemerintah yang tidak bekerja secara efektif untuk mereka (Dalio et al. 2017, 2). Di beberapa negara Eropa, suara mereka yang merasa tidak diperhatikan oleh elite yang mapan tersebut kemudian menemukan salurannya di partai-partai sayap kanan yang menyuarakan keresahan mereka, seperti AfD di Jerman, SPD di Ceko, dan Podemos di Spanyol.

Cas Mudde (2007) lebih lanjut mengemukakan karakteristik dari populisme bahwa filosofi dasar dari populisme terbagi dalam tiga ciri, yaitu anti-kemapanan (*anti-establishment*), otoriterisme, dan nativisme. Anti-kemapanan dipahami sebagai sebuah filsafat yang menekankan pada nilai kebijaksanaan dan kebajikan dari *ordinary people* atau *the silent majority* melawan berdirinya penguasa. Populisme mencerminkan sinisme mendalam dan kebencian kepada penguasa atau pejabat pemerintah yang ada. *Ordinary people* merupakan pihak homogen yang dianggap baik dan layak untuk menggantikan elite yang tidak jujur. Selanjutnya otoritarianisme dipahami sebagai dukungan untuk memunculkan kekuatan personal yang diberikan kuasa kepemimpinan, memimpin dengan kuat dan karismatik sehingga dapat dianggap mencerminkan kehendak rakyat. Sedangkan nativisme atau nasionalisme *xenophobia* yang mengasumsikan bahwa semua “orang” adalah kesatuan yang seragam atau homogen dengan identitas yang sama, di mana negara harus mengecualikan orang-orang dari negara dan budaya lain. Populisme mendukung monokulturalisme dari pada multikulturalisme, mendahulukan kepentingan nasional dari pada kerja sama internasional, menutup dan membatasi nilai-nilai liberal (Mudde, 2007). Salah satu yang membuat partai-partai kanan di Eropa menjaring lebih banyak suara, terutama di Ceko dan Jerman, adalah penentangannya terhadap kebijakan imigrasi yang dianggap terlalu terbuka. Di Austria, OVP yang konservatif meraup suara lebih banyak kursi di parlemen,

dan juga partai sayap kanan FPO, setelah mempromosikan kebijakan memerangi imigran ilegal dan Islam politik. Di sini terlihat mengapa Mudde mengajukan karakter anti-kemapanan karena partai-partai pemerintah atau yang berada di tengah dianggap tidak mendengar suara rakyat kebanyakan dan mengalihkan dukungan kepada partai-partai alternatif yang berbicara lantang dan berani mengkritik kebijakan pemerintah dan menguatkan nasionalisme.

Hal lain yang perlu dicermati adalah karakter nativisme yang menandakan adanya keinginan untuk menutup diri dari adanya unsur dari luar atau minimal bereaksi keras terhadap apa yang berasal dari luar dan mengganggu kemapanan sosial dan budaya. Ini yang menjelaskan mengapa partai-partai yang mengampanyekan sikap antiimigrasi. Kebetulan, beberapa tahun belakangan ini negara-negara di Eropa menghadapi tekanan untuk bersikap atas upaya pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika untuk memasuki benua tersebut dengan berbagai alasan.

Tentunya konsepsi yang demikian tidak terlepas dari apa yang terjadi di tempat tertentu dan belum tentu terjadi di tempat lainnya. Imigrasi bukanlah menjadi isu di Indonesia dan tentunya ekspresi politik Islam tidak juga menjadi masalah. Lalu apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya fenomena populisme pada peristiwa seperti ABI yang melibatkan massa dalam jumlah besar dengan menggunakan isu agama (Islam) sebagai daya tariknya? Vedi R. Hadiz menawarkan pendekatan baru untuk melihat populisme di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, yaitu *Islamic populism* atau populisme Islam. Istilah populisme Islam merupakan istilah yang belum begitu mengemuka dalam khazanah keilmuan, khususnya kajian ilmu politik. Hadiz (2016) menjelaskan bahwa populisme Islam ini hanyalah varian saja dari populisme yang cocok untuk menganalisis sebuah fenomena di sebuah negara yang memang mayoritas berpenduduk Muslim. Hadiz menjelaskan pula bahwa dalam *Islamic populism*, gerakan/alianse yang terbentuk terdiri dari beragam kelas yang asimetris (koalisi multikelas) dan massa yang terhimpun di dalamnya beragam (heterogen). Perbedaan antarkelas dalam *Islamic populism* akan menjadi hilang disatukan



oleh sebuah simbol bersama keagamaan tertentu yang telah disepakati (Hadiz 2016, 20).

*Islamic populism* sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan mobilisasi massa untuk melawan elite berkuasa yang serakah (*rapacious elites*) dan menggunakan agama sebagai pembentuk identitas politik bersama. Dalam pandangan *Islamic populism*, setiap individu, meskipun memiliki karakteristik yang beragam, merupakan bagian dari *ummah* (*community of believers*) sebagai representasi dari *the people* yang bergerak karena telah terpinggirkan dari elite sekuler. *Ummah* merupakan terminologi yang diperlukan untuk memobilisasi basis dukungan massa, di tengah kenyataan bahwa di dalam aliansi terdapat keberagaman yang kompleks di era masyarakat modern (Hadiz 2016, 12).

Walaupun memiliki perbedaan dengan konsep yang dikemukakan Mudde, konsep ini setidaknya menangkap beberapa hal yang serupa. Pertama, ada indikasi upaya untuk memiliki koneksi dengan apa yang dirasakan oleh orang banyak. Jika dalam kasus di Eropa ada keresahan akan masuknya imigran yang cukup banyak Muslim dan mengancam tatanan sosial, di dalam kasus negara-negara Muslim, setidaknya di Indonesia ada ancaman dari negara terhadap keberlangsungan dan masa depan umat. Negara dianggap tidak atau kurang ramah terhadap cita-cita dan karakter keumatan dan kurang peka terhadap meningkatnya religiusitas masyarakat Muslim (atau meningkatnya konservatisme Islam dalam istilah van Bruinessen). Artinya, segala tindakan yang bersifat populer akan dapat dikategorikan sebagai bagian dari populisme. Kedua, karena sifatnya yang populer tersebut maka akan terdapat unsur mobilisasi baik secara langsung dalam bentuk pengumpulan massa atau tidak langsung seperti dukungan politik dalam pemilihan umum. Ketiga, siapa saja yang melakukan tindakan populer tersebut akan masuk dalam pemimpin atau aktor yang menerapkan populisme.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dalam pandangan Kirk dan Miller (1986) merupakan sebuah tradisi dalam ilmu pengetahuan

sosial yang secara mendasar bergantung kepada proses pengamatan pada manusia baik dalam peristilahannya maupun dalam kawasannya. Pendekatan ini dipilih dalam tulisan ini karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan detail terhadap sebuah fenomena tertentu, khususnya penjelasan mengenai fenomena Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI meliputi penyebab kemunculan, aktor dan elemen yang terlibat di dalamnya, motif atau tujuan melaksanakan aksi dan bagaimana mobilisasi massa yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan memilih informan yang spesifik untuk mendapatkan data yang relevan. Informan tersebut antara lain adalah GNPF-MUI, seperti Ketua Dewan Penasihat GNPF-MUI, Ketua GNPF-MUI, pimpinan ormas Islam yang terlibat dalam Aksi Bela Islam di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammadiyah, serta masyarakat miskin perkotaan korban kebijakan penggusuran dan politisi yang terlibat dalam Aksi Bela Islam. Studi dokumen juga diperlukan untuk penelitian ini, di mana data akan di dapat antara lain melalui berita seputar GNPF-MUI di berbagai media massa.

## PENYEBAB KEMUNCULAN AKSI BELA ISLAM GNPF-MUI TAHUN 2016-2017

Munculnya fenomena Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI tidak terlepas dari beberapa konteks yang terjadi. Berdasarkan temuan lapangan dan berbagai data yang penulis dapatkan, setidaknya ada tiga penyebab kemunculan Aksi Bela Islam GNPF-MUI, yaitu konteks Ahok menjadi kandidat calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, adanya sentimen anti-Ahok, dan puncaknya penistaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu.

Pertama konteks Ahok menjadi kandidat Cagub dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Terjadi berbagai penolakan kemudian terhadap posisi Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta (menggantikan Jokowi) dan calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di antara penolakan yang berasal dari Front Pembela Islam (FPI). Sudah sejak semula FPI memiliki program Gubernur Muslim Jakarta (GMJ). FPI juga sudah memberikan

peringatan kepada umat sejak tahun 2012 ketika pencalonan Ahok bersama Jokowi di Pilkada DKI Jakarta. Slamet Ma'arif sebagai Juru Bicara FPI memberikan penjelasan sebagai berikut.

Sejak Pilkada 2012 kita sudah memberikan peringatan kepada umat, termasuk kepada politikus-politikus kita untuk tidak mencalonkan Ahok sebagai Wakil Gubernur karena ada peluang untuk menjadi Gubernur. Ketika bergulir wacana (Ahok) mencalonkan jadi Gubernur kita pun melakukan perlawanan, baik perlawanan secara politik, perlawanan massa. Malah seminggu sekali kita turun, setiap hari Jumat (demo) di depan DPRD DKI Jakarta (Wawancara dengan Slamet Ma'arif, 28 Oktober 2017).

Konteks keterlibatan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 juga menjadi alasan mendasar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai salah satu peserta Aksi Bela Islam GNPF-MUI untuk mau terlibat dalam Aksi Bela Islam GNPF-MUI. Diakui oleh Ismail Yusanto selaku Juru Bicara HTI, bahwa dugaan penistaan agama Ahok yang saat itu terjadi menjadi salah satu titik lemah Ahok dalam kontestasi Pilkada yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk menggerus elektabilitas Ahok.

Penyebab kedua munculnya Aksi Bela Islam GNPF-MUI adalah sentimen anti-Ahok yang digulirkan oleh berbagai pihak, khususnya ormas Islam. Bentuk sentimen yang muncul adalah sentimen nativisme (karena Ahok nonmuslim dan berasal dari etnis Cina), karakter personal Ahok yang buruk, dan kebijakan yang dinilai merugikan banyak pihak khususnya muslim di Jakarta. Terdapat berbagai penolakan terkait pemimpin nonmuslim di DKI Jakarta. Penolakan tersebut didasarkan dengan pedoman Alquran dan Hadis tentang haramnya memilih pemimpin kafir sebagai pemimpin, sebagaimana yang disampaikan oleh Slamet Ma'arif selaku Juru Bicara FPI. HTI juga sebagai ormas Islam yang turut terlibat dalam Aksi Bela Islam memberikan pandangan tentang larangan memilih pemimpin kafir. Sementara itu, penolakan Ahok yang disebabkan sentimen nativisme karena Ahok berasal dari etnis Cina muncul dalam beberapa temuan lapangan, di antara FPI melalui juru bicaranya, Slamet Ma'arif yang memberikan penjelasan

adanya sikap penolakan terhadap kepemimpinan Ahok. Penolakan tersebut didasari oleh adanya keberpihakan Ahok terhadap “Aseng” atau orang dari Cina untuk menguasai Jakarta, sementara pribumi terpinggirkan.

Selanjutnya, penolakan Ahok di Jakarta juga disebabkan karakter buruk Ahok yang dinilai tidak mencerminkan sikap pemimpin yang sepatutnya. Terdapat penolakan oleh FPI, melalui Juru Bicaranya Slamet Ma’arif, dia memberikan penjelasan bahwa Ahok tidak pantas memimpin Jakarta. Slamet menerangkan bahwa “Ahok tidak tepat memimpin Jakarta, tidak cocok dengan karakter orang Jakarta. Ahok juga tidak menghargai kultur budaya dan *local wisdom*. Itu yang kita lawan. Termasuk ketika pedagang kurban di daerah Tanah Abang yang akan akan diusir, akan digusur” (Wawancara dengan Slamet Ma’arif, 28 Oktober 2017). Lalu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui juru bicaranya, Ismail Yusanto, juga memberikan pandangan bahwa Ahok sikap dan omongannya kasar terhadap banyak orang. Temuan lapangan selanjutnya lainnya adalah penilaian Ahok dari pihak Muhammadiyah. Mashuri Masyhuda, Ketua Komando Kawal Al-Maidah (KOKAM) Muhammadiyah menilai Ahok selalu mempertontonkan hal yang tidak seharusnya bagi seorang pemimpin seperti menggunakan kata kotor dan bahasa “Ragunan”. Terakhir sentimen penolakan Ahok muncul karena ada beberapa kebijakan yang dianggap merugikan umat muslim di Jakarta selama kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Kebijakan tersebut kemudian mendapatkan respon dari berbagai pihak. Kebijakan yang merugikan umat muslim tersebut di antaranya larangan mengenai larangan takbir keliling ([merdeka.com](http://merdeka.com), 6 Juli 2016), dan larangan zikir di Monas ([beritasatu.com](http://beritasatu.com), 17 Oktober 2015).

Selain itu, selama kepemimpinan Ahok, beberapa daerah yang terdapat warga miskin juga mengalami penggusuran. Salah satunya adalah penggusuran warga Kampung Akuarium Pasar Ikan. Berbagai kekecewaan terhadap kebijakan Ahok tersebut kemudian memunculkan sinisme dan kebencian kepada Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kebencian tersebut diekspresikan dengan berbagai penilaian buruk warga terhadap Ahok, di antaranya Ahok dinilai tidak mendidik, Ahok adalah

preman, dan Ahok hanya pencitraan. Dalam hal ini, Diani sebagai salah satu warga di Kampung Akuarium menjelaskan bahwa “Ahok tidak mendidik. Tidak ada pemimpin yang seperti itu. Itu preman, bukan pemimpin. Merasa dirinya benar dan taat hukum itu bohong, pencitraan” (Wawancara dengan Dharma Diani, 23 Oktober 2017). Warga juga mengekspresikan dengan menuliskan sesuatu di bangunan yang telah digusur dengan kata “Musuh Ahok” sebagai bentuk kekecewaan.

Gambar 1. Ungkapan Kemarahan Warga Korban Penggusuran



Sumber: foto dari detik.com

Terakhir, penyebab kemunculan Aksi Bela Islam oleh GNPf-MUI adalah pidato Ahok pada 27 September 2016 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu saat melakukan kunjungan kerja. Rekaman pidato tersebut kemudian menjadi viral di media sosial dan dinilai mengandung unsur penistaan agama. Berikut penggalan pidato Ahok yang kontroversi tersebut.

Kan, bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu (bbc.com, 17 November 2016).

Respon cepat kemudian muncul dari berbagai pihak. Juru bicara FPI menyampaikan apa yang dilakukan Ahok memiliki unsur kesengajaan menistakan agama, baik karena ketidaktahuan atau karena ingin men-

cari pamor. Secara tersirat disampaikan bahwa Alquran dijadikan alat untuk membohongi, kemudian bisa ditafsirkan juga bahwa ulama bahkan nabi membohongi umat dengan menggunakan Alquran. Sementara juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia menguatkan bahwa secara verbal kata-kata Ahok menunjukkan pemaknaan membohongi yang berasal dari Alquran. Salah satu aktivis Tionghoa, Zeng Wei Jian juga menganggap bahwa ini menyalahi kaidah pluralisme dan penghormatan terhadap agama. Kasus penodaan agama seharusnya menjadi masalah bagi siapa saja yang mendukung kebhinekaan dan keberagaman, apapun agama yang dianut karena hal tersebut melanggar konstitusi dan dasar negara. Perlakuan semacam ini menyebabkan keresahan umat Islam dan berpotensi memecah hubungan antargolongan. Penistaan agama yang terjadi ini ditanggapi juga oleh warga Kampung Akuarium Pasar Ikan sebagai korban dari kebijakan penggusuran. Dharma Diani sebagai salah satu warga mengatakan bahwa peristiwa ini merupakan sebuah anugerah dari Tuhan dan Ahok pasti memiliki sisi kekurangan.

Beberapa temuan lapangan yang menjelaskan tentang penyebab kemunculan Aksi Bela Islam GNPF-MUI, yaitu konteks Ahok menjadi kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang kemudian memunculkan sentimen penolakan terhadap Ahok, yang dikarenakan oleh statusnya sebagai nonmuslim, sentimen penolakan Ahok yang didukung oleh Etnis Cina, menggambarkan adanya sentimen nativisme yang merupakan salah satu ciri dalam populisme, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cas Mudde (2007). Cas Mudde mengemukakan bahwa semua “orang” adalah kesatuan yang seragam atau homogen dengan identitas yang sama; bahwa negara harus mengecualikan orang-orang dari negara dan budaya lain. Kemudian, penolakan Ahok yang disebabkan adanya kebijakan yang merugikan, baik merugikan Muslim di Jakarta atau masyarakat miskin kota korban penggusuran juga merupakan bentuk perlawanan anti-kemapanan. FPI dan HTI melakukan berbagai aksi penolakan dan kampanye tolak pemimpin kafir jauh sebelum adanya penistaan agama oleh Ahok di Kepulauan Seribu. Sementara warga Kampung Akuarium Pasar Ikan melakukan aksi demonstrasi ke Bareskrim hingga Balaikota menentang kebijakan penggusuran Ahok.

Setelah kejadian dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu, muncullah protes yang melibatkan massa yang lebih besar, yaitu Aksi Bela Islam yang dimulai dari Oktober 2016 sampai 5 Mei 2017 sebanyak 7 kali aksi. Aksi Bela Islam pertama dimulai pada 14 Oktober 2016 yang dilakukan di masjid Istiqlal dalam bentuk shalat Jumat, kemudian melanjutkan orasi di depan kantor Bareskrim dan Kantor Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan tuntutan segera mengadili Ahok. ABI pertama ini hanya diinisiasi oleh Front Pembela Islam. Proses hukum Ahok yang dinilai lambat membuat beberapa tokoh seperti Habib Rizieq dan Bachtiar Nasir terus melakukan koordinasi, hingga bersepakat untuk membentuk satu wadah yang bisa mengakomodasi umat Islam secara lebih luas. Maka dibentuklah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI). ABI kedua pun dilakukan, yaitu pada 4 November 2016 yang dikenal dengan Aksi Bela Islam 411, dilaksanakan di depan Istana Negara. Dalam ABI 411, tuntutan masih sama untuk segera menetapkan tersangka bagi Ahok. Saat 411, jumlah massa lebih banyak dari aksi perdana dan diha-diri oleh kalangan umat Islam yang lebih beragam selain FPI.

GNPF-MUI masih menilai aparat penegak hukum lambat untuk memproses kasus Ahok. Hingga kembali digelar Aksi Bela Islam pada 2 Desember 2016 yang dikenal dengan ABI 212. Aksi ini seperti menjadi puncak, di mana massa yang hadir menjadi lebih beragam dan lebih banyak. Hadir dalam ABI 212 selain dari FPI adalah Muhammadiyah, HTI, jamaah AQL Ustadz Bachtiar Nasir, Ustadz Aa Gym, Ustadz Yusuf Mansyur, bahkan ada yang dari kalangan miskin kota korban peng-gusuran, yaitu masyarakat Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak hanya itu, masyarakat di luar DKI Jakarta pun ada yang hadir, bahkan sampai lintas provinsi dan pulau, dan ada juga yang rela untuk berjalan dari Ciamis. Meskipun Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka, ABI 212 tetap menyerukan agar Ahok adili seadil-adilnya sampai penetapan hukuman akhir.

Setelah ABI 212, empat aksi setelahnya pun dilakukan, yaitu Aksi Bela Islam 112 pada 11 Februari 2017, Aksi Bela Islam 212 pada 21 Februari 2017, Aksi Bela Islam 313 pada 31 Maret 2017, dan Aksi Bela

Islam 55 pada 5 Mei 2017. Pada empat Aksi Bela Islam setelah ABI 212, terjadi kondisi yang berbeda. Meski masih menggunakan nama GNPF-MUI, namun massa yang terlibat dalam Aksi Bela Islam jauh lebih sedikit, yaitu hanya sebagai FPI dan Forum Umat Islam (FUI). Massa lain, seperti Muhammadiyah, HTI dan individu yang datang dari luar DKI Jakarta sudah tidak ditemukan lagi. Namun, ketika salah satu elemen dari ABI tersebut mengadakan reuni pada tanggal 2 Desember 2018 dengan mengambil momentum tanggal yang disimbolkan dengan 212, massa yang datang kembali meningkat dan menyamai aksi dua tahun sebelumnya.

#### POPULISME ISLAM DALAM AKSI BELA ISLAM GNPF-MUI?

Seperti disebutkan sebelumnya, adanya mobilisasi massa yang berkumpul dalam satu momen tertentu dapat merupakan salah satu bentuk populisme. Elemen dasar dari populisme, yaitu terkait dengan keinginan orang banyak yang dikapitalisasi oleh aktor tertentu dapat dengan mudah ditemui dalam aksi tersebut. Perekat dalam aksi ini tentunya adalah Islam sebagai identitas penting bagi warga yang memeluknya dan lebih khusus lagi yang merasa terusik dengan berbagai kejadian di sekeliling mereka. Tentunya ini terkait dengan keterikatan dari sebagian Muslim yang memiliki derajat yang berbeda dengan Muslim lainnya yang lebih awam.

Berbeda dengan populisme di Eropa yang erat terkait dengan isu imigrasi yang dianggap dapat mengganggu identitas keeropaan mereka atau populisme di Asia yang diasosiasikan dengan kebijakan penguasa yang populer (Thaksin Sinawatra di Thailan dan Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo di Indonesia) karena terkait dengan pemberian materi, perekat mereka yang menghadiri ABI adalah agama. Tidak heran jika sebagian ahli kemudian mencoba mendefinisikan fenomena populisme dalam masyarakat Muslim secara khusus yang dikenal dengan populisme Islam.

Populisme Islam dalam konsepsi Vedi R. Hadiz sendiri menekankan pada keterlibatan aliansi multikelas yang berhasil dibentuk, meski



dalam kenyataannya koalisi tersebut sangatlah heterogen. Analisis kelas tersebut sedikit banyak kurang tepat untuk disematkan pada ABI mengingat aksi tersebut bukanlah melulu persoalan kelas. Pada fenomena Aksi Bela Islam GNPf MUI, khususnya pada Aksi Bela Islam 411 dan 212, mungkin unsur pembentukan koalisi multikelas tersebut sebagian dapat dipenuhi mengingat massa yang terlibat datang dari semua kelas. Namun, kelas yang dimaksud dalam populisme Islam menurut Hadiz adalah kelompok yang ditentukan oleh kepemilikan materi. Sementara, alasan utama adanya aksi tersebut adalah hal yang sifatnya transenden dan lebih berupa pengelompokan yang lebih kompleks. PKS yang menjadi salah satu landasan Hadiz untuk membangun konsep populisme Islam sebagai perwakilan kelas menengah yang mengalami mobilisasi vertikal dan menjadi faktor dalam politik nasional (bersama AKP di Turki) memang menjadi salah satu kelompok yang terlibat dalam aksi ini. Namun, terlalu dini untuk mengatakan bahwa ABI secara keseluruhan menjadi perwakilan dari populisme Islam. Tidak heran jika Hadiz sendiri terlihat lebih melihat aksi ini sebagai bentuk mobilisasi elite daripada bagian dari populisme Islam.

Melihat dari awal pembentukannya dan pelaksanaan aksi, argumen mobilisasi oleh elite memiliki dasarnya. Habib Rizieq dengan FPI selama ini lebih dikenal sebagai kelompok yang tidak jarang menggunakan cara-cara aksi secara langsung di jalan. Walaupun mendapat dukungan dari sebagian masyarakat Muslim, selama ini aksinya kurang mendapat dukungan secara masif, termasuk ketika secara konsisten menentang Ahok sebagai gubernur di Jakarta. Namun, sikap tegas Rizieq tersebut mendapatkan momentumnya ketika Ahok mengutip salah satu ayat Alquran dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara seperti dijelaskan sebelumnya.

Pasca-Aksi Bela Islam pertama 1410, para tokoh-tokoh Islam bersatu membentuk sebuah gerakan bersama bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) untuk melakukan aksi demonstrasi membela Alquran dan menuntut Ahok diadili seadil-adilnya. Proses pembentukan GNPf-MUI awalnya hanya dipelopori oleh tokoh dari Habib Rizieq dari Front Pembela Islam (FPI)

dan Bachtiar Nasir (Pimpinan AQL Islamic Center). Sampai akhirnya, GNPF-MUI menjadi wadah bersama berkumpulnya ormas Islam dan elemen lainnya dalam Aksi Bela Islam..

Pada saat Aksi Bela Islam, elemen yang terlibat dalam aksi demonstrasi terdiri dari kelompok Islam moderat, kelompok Islam moderat-konservatif, kelompok Islam garis keras, masyarakat miskin perkotaan korban penggusuran dan kelompok sekuler. Masing-masing kelompok Islam yang terlibat memiliki perbedaan cara pandang dalam beberapa praktker menjalankan ibadah dan metode berdakwah. Kelompok Islam moderat adalah mereka yang memiliki karakteristik perjuangannya lebih ke arah membangun berbagai amal usaha yang dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai lembaga pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun rumah sakit, dan panti asuhan (<http://www.muhammadiyah.or.id>). Dalam Aksi Bela Islam, kelompok Islam moderat yang terlibat adalah Muhammadiyah dan sebagian pengikut Nahdlatul Ulama (NU) dari kalangan Nahdliyin (warga NU). Kemudian kelompok Islam moderat-konservatif yang dimaksud adalah mereka yang terdidik, sebagian besar kelas menengah, memiliki keterbukaan terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, namun tetap memegang nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Kelompok Islam moderat-konservatif yang ikut dalam Aksi Bela Islam adalah para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan jamaah atau pengikut dai populer seperti jamaah AA Gym dan Ustadz Yusuf Mansyur. Kelompok Islam garis keras juga turut terlibat dalam Aksi Bela Islam, mereka adalah kelompok Islam yang memiliki karakteristik perjuangan Islam dengan cara-cara yang tegas, dan cenderung tidak begitu terbuka dengan kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Mereka adalah ormas Islam Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kompleksitas peserta ABI juga terlihat dari adanya kelompok yang bergabung tetapi tidak dilandaskan atas alasan agama. Selain dari kalangan kelompok Islam, peserta Aksi Bela Islam juga terdiri dari kelompok masyarakat miskin perkotaan korban penggusuran. Mereka adalah masyarakat Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara yang ter-

gerak untuk terlibat aksi dikarenakan kecewa terhadap Ahok yang telah mengusir kampung mereka. Salah satu warga Kampung Akuarium Pasar Ikan, Dharma Diani memberikan penjelasan bahwa “Pemerintah sudah menjauh dari nilai kerakyatan. Ahok sudah melantur kemana-mana, bikin kita mau bergerak. Karena [berdasarkan] agama murni [saja] juga tidak sebenarnya. Faktor lain karena kami digusur” (Wawancara dengan Dharma Diani, 23 Oktober 2017). Kelompok terakhir yang terlibat dalam Aksi Bela Islam adalah kelompok sekuler. Mereka adalah para tokoh politik dan simpatisan dari partai Gerindra yang merupakan oposisi partai pendukung Ahok dalam konteks kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Salah satu tokoh politik Gerindra yang terlibat aksi dan sempat diberi kesempatan untuk orasi adalah Fadli Zon. Selain dari kalangan politisi dan simpatisan partai, kelompok sekuler yang dimaksud juga berasal dari tokoh-tokoh etnis Tionghoa seperti Zeng Wei Jian (Kenken) dan Lieus Sungkharisma.

Aspek lain dalam populisme Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Vedi R. Hadiz terdapat karakteristik utama yang melekat, yaitu *ummah* sebagai sebuah kelompok yang memiliki kebajikan moral dan berbudaya. *Ummah* diperlukan untuk memobilisasi basis dukungan massa, di tengah kenyataan bahwa di dalam aliansi terdapat keberagaman yang kompleks di era masyarakat modern. Dalam konteks Aksi Bela Islam GNPF-MUI, *ummah* yang dimaksud adalah para peserta Aksi Bela Islam yang terdiri dari beragam kelas, telah membentuk sebuah koalisi berdasarkan semangat bersama, yaitu “Pembela Islam atau *Islamic Defender*”. Bela Quran kemudian menjadi turunan dari pembelaan yang dimaksud, menggambarkan bahwa perjuangan mereka dilandasi oleh nilai kebajikan di mana ada kitab suci yang telah dinodai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Juru Bicara FPI, Slamet Ma'arif yang menjelaskan bahwa.

Nah iya, bela Quran itu yang menyatukan mereka saya pikir. Dan ternyata Quran kan menyatukan umat dan menghilangkan perbedaan yang ada. Makanya sangat menarik ketika shalat Jumat sebelumnya. Jadi yang imam itu ternyata tokoh Muhammadiyah, tapi

pakai Qunut. Tradisi NU, kan jarang sekali. Khatibnya Habib Rizieq dari kalangan Habaib. Kemudian habis shalat saling menghormati, zikir masing-masing. Artinya tradisi ibadah yang selama ini mereka laksanakan ketika itu mereka kesampingkan, persatuan umat bela Quran dinomorsatukan. Itu yang luar biasa (Wawancara dengan Ismail Yusanto, 28 Oktober 2017).

Mengiringi semangat “Bela Quran” muncul beberapa bentuk nilai ke-bajikan lain sebagai sebuah turunan, yaitu penolakan terhadap kepemimpinan Ahok yang dinilai buruk secara kepribadian dan bukan dari kalangann Muslim serta kebijakannya yang menimbulkan kekhawatiran bagi muslim di Jakarta (*Islamic anxiety*). Kekhawatiran tersebut adalah kekhawatiran akan adanya kebijakan yang semakin membuat Muslim di Jakarta termarginalkan. Mereka tidak menginginkan adanya lagi kegiatan agama yang dilarang, seperti takbiran, pemotongan kurban dan lainnya.

Selanjutnya tentang *ummah* dalam populisme Islam, menurut pandangan Hadiz, kemudian dimanfaatkan untuk memobilisasi massa melawan elite berkuasa yang serakah (*rapacious elites*) dengan menggunakan alasan agama sebagai pembentuk identitas politik bersama. Hal tersebut tampak pada tindakan yang dilakukan oleh FPI dan HTI sebagai bagian dari peserta Aksi Bela Islam, ketika keduanya melakukan mobilisasi massa dari seluruh Indonesia dilandaskan alasan agama sebagai energi penggerak serta memanfaatkan struktur sosial yang ada di masing-masing ormas. FPI memobilisasi semua kadernya di seluruh Indonesia untuk datang ke Jakarta turut terlibat dalam Aksi Bela Islam. Semua massa FPI dari semua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW), semua koordinator lapangan setiap wilayah diturunkan, hingga diklaim sampai 3 juta orang. FPI yang sudah berdiri di 19 provinsi semua kadernya dikerahkan dalam Aksi Bela Islam (Wawancara Slamet Ma’arif, 28 Oktober 2017). Sementara HTI juga melakukan mobilisasi massa. Ismail Yusanto sebagai Juru Bicara FPI memberikan penjelasan bahwa HTI melakukan mobilisasi kader dari seluruh daerah di Indonesia, mu-

lai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan daerah lainnya (Wawancara Ismail Yusanto, 16 Oktober 2017).

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis, fakta di lapangan saat Aksi Bela Islam, khususnya pada ABI 411 dan 212, memang telah berkumpul aliansi multikelas yang terdiri dari kelompok Islam moderat, kelompok Islam moderat-konservatif, kelompok Islam garis keras, masyarakat miskin perkotaan korban penggusuran dan kelompok sekuler. Namun demikian, aliansi multikelompok tersebut menurut penulis belum bisa dianalisis seutuhnya sebagai aliansi populisme Islam yang dimaksudkan oleh Vedi R. Hadiz. Hal tersebut dikarenakan aliansi ini tidak terbukti bertahan lama. Aksi Bela Islam GNPF-MUI dilaksanakan sebanyak tujuh kali, namun pasca-Aksi Bela Islam 212 pada 2 Desember 2016 di Monas, aksi-aksi setelahnya tidak lagi dihadiri oleh jumlah massa yang banyak dan hanya FPI dan Forum Umat Islam (FUI) saja yang terlibat. Bahkan meski tetap menggunakan payung GNPF-MUI dalam aksi-aksi setelah ABI 212, Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Ketua GNPF-MUI pernah menegaskan bahwa GNPF-MUI tidak ikut terlibat lagi pasca-Aksi Bela Islam 212. Dalam hal ini Bachtiar Nasir memberikan penjelasan bahwa

Pasca-ABI 212, karena kita di GNPF ada yang dikatakan kelompok FPI dan lain-lain bercampur, masing-masing dengan gaya kerjanya. Ini nih kelompok-kelompok yang selalu ingin dalam bentuk aksi-aksi lapangan, ya sudah lah kalau gitu. Sementara, GNPF bekerja dalam skala nasional, di langkah-langkah strategisnya. Untuk melakukan kerja-kerja senyap, strategis. (Wawancara Bachtiar Nasir, 8 Oktober 2017).

Pihak lain yang mengaku tidak lagi terlibat aktif setelah Aksi Bela Islam 212 adalah Muhammadiyah. Mashuri Masyhuda selaku ketua Kokam Muhammadiyah yang menjadi pelopor aksi dari kalangan Muhammadiyah ingin menyimpan energi karena Ahok sudah ditetapkan tersangka dan diproses hukumnya. Kumpul rutin antarelemen Muhammadiyah menyatakan sudah tidak ingin terlibat lagi pasca-212 (Wawancara Mashuri Masyhuda, 24 Oktober 2017).

Selain tidak tidak kuatnya ikatan aliansi multikelas yang terbentuk, hal lain yang membuat Aksi Bela Islam tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai populisme Islam adalah beragamnya pemaknaan *ummah* yang dipahami masing-masing pihak. Identitas bersama yang sudah disepakati oleh GNPf-MUI adalah sebagai pembela Islam yang membela Alquran yang telah dinodai oleh Ahok. Kemudian seruan yang disepakati dalam Aksi Bela Islam adalah untuk menuntut keadilan bagi penista agama. Namun realita yang terjadi di lapangan, berdasarkan observasi langsung, khususnya ABI 411 dan 212, terjadi ragam seruan atau tuntutan, bahkan bergeser kepada seruan-seruan seperti tolak pemimpin kafir dan pilih pemimpin muslim. Seruan tersebut sudah mengarah ke ranah politis yang tentunya disebabkan oleh Ahok sendiri yang menjadi salah satu kontestan dalam Pilkada DKI Jakarta. Kesempatan Ahok menistakan agama juga dimanfaatkan oleh beberapa pihak dalam Aksi Bela Islam untuk menggerus elektabilitas Ahok, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail Yusanto selaku Juru Bicara dari HTI.

Namun demikian, tetap ada peserta Aksi Bela Islam yang datang memang murni untuk membela Alquran dan tidak terpengaruh dengan seruan politis yang ada, misalnya saja ada seorang kakek bernama Sofyan Sauri yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, berusia 69 tahun. Ia turut terlibat dalam Aksi Bela Islam 212 menggunakan biaya sendiri. Saat ditanya alasan apa yang membuat tergerak, kakek tersebut mengatakan tidak terima Alquran dilecehkan. Bukan hanya kakek-kakek saja, ada ribuan santri dari berbagai Pesantren di Ciamis, Jawa Barat yang melaksanakan *long march* berjalan kaki pergi ke DKI Jakarta untuk mengikuti Aksi Bela Islam “212” di Monas (Lesus et al. 2017, 46-47).

## KESIMPULAN

Aksi Bela Islam “411” dan “212” kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari konteks keterlibatan Ahok sebagai salah satu kontestan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam hal ini, terdapat beberapa konteks politik penyebab kemunculan Aksi Bela Islam “114” dan “212” oleh GNPf-MUI tahun 2016, yaitu konteks pencalonan Ahok sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, sentimen anti-Ahok

disebabkan kebijakan yang memarjinalkan muslim di DKI Jakarta, dan pendooan agama yang dilakukan oleh Ahok di Kepulauan Seribu menjadi puncaknya.

Aksi Bela Islam GNPF MUI menunjukkan adanya sebagian unsur-unsur populisme Islam yang dipenuhi dalam gerakan ini. Unsur tersebut adalah adanya aliansi multikelompok yang terbentuk, berasal dari kelompok Islam moderat, kelompok Islam moderat-konservatif, kelompok Islam garis keras, masyarakat miskin perkotaan korban penggusuran dan kelompok sekuler. Namun demikian, aliansi multikelas tersebut menurut penulis belum bisa dikatakan seutuhnya sebagai aliansi populisme Islam yang dimaksudkan oleh Vedi R. Hadiz. Populisme yang terbentuk merupakan populisme Islam yang semu dikarenakan aliansi ini tidak terbukti bertahan lama. Aksi Bela Islam GNPF-MUI dilaksanakan sebanyak tujuh kali, namun pasca-Aksi Bela Islam 212 pada 2 Desember 2016 di Monas, aksi-aksi setelahnya tidak lagi dihardiri oleh jumlah massa yang banyak dan hanya FPI dan Forum Umat Islam (FUI) saja yang terlibat. Kesulitan lain yang ditemukan adalah penggunaan pendekatan kelas dalam konsep populisme Islam. Penggunaan analisis kelas ini tentunya memberikan kesulitan kepada konsep itu sendiri untuk diterapkan pada fenomena populisme lainnya dengan menggunakan isu agama.

Analisis kedua yang menyimpulkan bahwa populisme Islam dalam Aksi Bela Islam GNPF-MUI tidak sepenuhnya terpenuhi adalah perbedaan seruan yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan Aksi Bela Islam. Seruan yang telah disepakati oleh GNPF-MUI, yaitu bela Quran tidak sepenuhnya bisa dijalankan oleh peserta aksi. Muncul seruan-seruan lainnya seperti tolak pemimpin kafir dan pilih pemimpin Muslim. Kondisi tersebut membuktikan bahwa *Ummah* sebagai identitas bersama pemersatu, tidak sepenuhnya bisa diterima dan dipahami utuh oleh semua elemen yang terlibat dalam Aksi Bela Islam.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian skripsi yang dikembangkan. Penelitian untuk artikel ini dilakukan dengan bantuan pembiayaan

dari FISIP UI melalui skema Hibah Riset FISIP UI tahun 2017. Kami juga sangat berterima kasih kepada Syahrul Hidayat, Ph.D yang telah membantu kami dalam mengembangkan artikel ini menjadi lebih baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aliansyah, Muhammad Agil. 2016. "Pedasnya Ahok tolak keinginan FPI takbir keliling." Merdeka.com. 6 Juli. <https://www.merdeka.com/jakarta/pedasnya-ahok-tolak-keinginan-fpi-takbir-keliling-dki.html> ( 24 November 2017).
- Arvian, Yandhrie. 2017. "Vedi Hadiz: Oligarki Kendalikan Konservaisme Islam di Indonesia." Tempo.co. 16 September. <https://nasional.tempo.co/read/909736/vedi-hadiz-oligarki-kendalikan-konservatisme-islam-di-indonesia> (30 Desember 2017).
- Aspinall, Edward. 2015. "Oligarchic Populism: Prabowo Subianto's Challenge to Indonesian Democracy." *Indonesia* 99 (April): 1-28.
- Batubara, Herianto. 2016. "Pria ini Hitung Jumlah Massa di Aksi 2 Desember Begini Hasilnya." Detiknews.com. 6 Desember. <https://news.detik.com/berita/d-3363747/pria-ini-hitung-jumlah-massa-di-aksi-2-desember-begini-hasilnya> (2 Januari 2018).
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Terjemahan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dalio, Ray., dkk. 2017. *Populism: The Phenomenon*. Westport: Bridge-water Associates.
- Fealy, Greg. 2016. "Bigger than Ahok: explaining the 2 December mass rally." Indonesia at Melbourne. 7 Desember. <http://indonesia-atmelbourne.unimelb.edu.au/bigger-than-ahok-explaining-jakartas-2-december-mass-rally/> (20 Maret 2017).
- Hadiz, Vedi R. 2014. "A New Islamic Populism and the Contradictions of Development." *Journal of Contemporary Asia* 44 (1): 125-143.
- Hadiz, Vedi R. 2016. *Islamic Populism in Indonesia and The Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.



- Hadiz, Vedi R. 2018. "Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 48 (4): 1-18.
- Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. 2017. "Competing Populisms in Post-authoritarian Indonesia." *International Political Science Review* 38 (4): 488-502.
- Lesus, Rizki., dkk. 2017. *Mengetuk Pintu Langit: Catatan Reportase Aksi Bela Islam Jurnalis Islam Bersatu*. Jakarta: Jurnalis Islam Bersatu (JITU).
- Hamid, Abdul. 2014. "Jokowi's Populism in the 2012 Jakarta Gubernatorial Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 33 (1): 85-109.
- Hedman, Eva-Lotta E. 2001. "The Spectre of Populism in Philippine Politics and Society: Artista, Masa, Eruption!." *South East Asia Research* 9 (1): 5-44.
- Inglehart, Ronald F. dan Pippa Noris. 2016. "Trump, Brexit and The Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash." 6 Agustus. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2818659](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2818659) (22 Oktober 2017).
- McCargo, Duncan. 2001. "Populism and Reformism in Contemporary Thailand." *South East Asia Research* 9 (1): 89-107.
- Mietzner, Marcus. 2009. *Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System*. Sydney: Lowy Institute for International Policy.
- Mietzner, Marcus. 2015. *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia*. Honolulu: East-West Center.
- Miller, Marc L., dan Jerome Kirk. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Newbury Park: Sage Publications.
- Moffitt, Benjamin. 2014. "Contemporary Populism and "The People" in the Asia-Pacific Region: Thaksin Shinawatra and Pauline Hanson". dalam *The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives*, ed. Carlos de la Torre, Kentucky, University Press of Kentucky, 293-316.

- Mudde, Cas. 2007. *Populist Radical Right Parties in Europe*. New York: Cambridge University Press.
- Muhammadiyah. Tanpa Tahun. "Ciri Perjuangan Muhammadiyah." <http://www.muhammadiyah.or.id/id/content-176-det-ciri-perjuangan.html> (21 November 2017).
- Okamoto, Masaaki. 2009. "Populism under Decentralization in Post-Suharto Indonesia." dalam *Populism in Asia*, ed. Kosuke Mizuno dan Pasuk Phongpaichit. Singapore: NUS Press, 144-164.
- Power, Thomas P. 2018. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 54 (3): 307-338.
- Pratikno dan Cornelis Lay. 2013. "From Populism to Democratic Polity: Problems and Challenges in Solo, Indonesia." dalam *Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics*, ed. Kristian Stokke dan Olle Törnquist. London: Palgrave Macmillan, 254-276.
- Phongpaichit, Pasuk dan Chris Baker. 2008. "Thaksin's Populism." *Journal of Contemporary Asia* 38 (1): 62-83.
- Rudi, Alsadad. 2016. "Ahok Larang Sekolah Negeri Wajibkan Siswinya Pakai Jilbab." Kompas.com. 4 Juni. <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/06/04/15585481/ahok.larang.sekolah.negeri.wajibkan.siswinya.pakai.jilbab> (24 November 2017).
- Tambun, Lenny Tristia. 2015. "Ini Alasan Basuki Larang Pengajian di Monas." Beritasatu.com. 17 Oktober. <http://www.beritasatu.com/megapolitan/314972-ini-alasan-basuki-larang-pengajian-di-monas.html> (24 November 2017).
- Setijadi, Charlotte. 2017. "Ahok's Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia." ISEAS Perspective 38. 8 Juni. [https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS\\_Perspective\\_2017\\_38.pdf](https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_38.pdf) (9 November 2017).
- Wawancara dengan Bachtiar Nasir pada tanggal 8 November 2017.
- Wawancara dengan Dharma Diani pada tanggal 23 Oktober 2017.
- Wawancara dengan Ismail Yusanto pada tanggal 16 Oktober 2017.
- Wawancara dengan Mashuri Masyhuda pada tanggal 24 Oktober 2017.

Wawancara dengan Slamet Ma'arif pada tanggal 28 Oktober 2017.

Wawancara dengan Zeng Wei Jian pada tanggal 23 Oktober 2017.

Wilson, Ian. 2016. "Making Enemies out of Friends". New Mandala. 3 November. <https://www.newmandala.org/making-enemies-friends/> (9 November 2017).

Ziv, Daniel. 2001. "Populist Perceptions and Perceptions of Populism in Indonesia: The Case of Megawati Soekarnoputri." *South East Asia Research* 9 (1): 73-88.

